

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan yang terjadi dalam pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Hal ini sangat berbanding lurus dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di berbagai negara berkembang, khususnya di Indonesia yang disebabkan oleh pengelolaan yang buruk (*bad governance*) dan buruknya birokrasi yang terjadi. Menurut *World Bank good governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo 2018: 18).

Dalam rangka mewujudkan *good governance* pemerintah harus melakukan perubahan pada seluruh sektor pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang harus dilakukan yaitu adanya audit internal maupun eksternal terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal, sehingga kesalahan dan tindak pidana yang dapat merugikan negara bisa berkurang dan menghasilkan kualitas audit

yang baik. Adanya perubahan yang baik dalam bidang pengawasan maka kualitas hasil pemeriksaan juga meningkat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Auditor akan memberikan keyakinan positif yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang mampu dicapai auditor akan ditentukan oleh hasil bukti yang dikumpulkan. Semakin banyak jumlah bukti yang relevan dan kompeten, semakin tinggi pula keyakinan yang dicapai oleh auditor.

Seiring dengan banyaknya tuntutan dan keinginan dari masyarakat agar pemerintah meningkatkan kualitas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitasnya maka diperlukan audit yang berkualitas. Hasil informasi audit yang berkualitas akan menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, maka dari itu kualitas audit sangat diperlukan karena merupakan bagian sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Untuk mendapatkan kualitas audit yang baik seorang auditor diperlukan sikap auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik, karena jika seorang auditor memiliki kualitas audit yang buruk bisa saja menimbulkan kesalahan maupun kecurangan yang disengaja, dengan demikian seorang auditor yang baik sangat dibutuhkan agar bisa menghasilkan kualitas audit yang dapat dipercayai kebenarannya.

Kualitas audit memungkinkan bahwa seorang auditor akan bisa menemukan dan melaporkan adanya suatu penyelewengan atau kecurangan dalam sistem akuntansi klien. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP),

audit yang dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit (SPAP 2015). Oleh sebab itu kualitas audit dapat diartikan sebagai baiknya tindakan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam menemukan dan mengungkapkan kesalahan atau pelanggaran yang bersifat material dalam sebuah laporan keuangan.

Demi mewujudkan kualitas audit yang baik tentunya seorang auditor harus memperhatikan beberapa faktor penting untuk menunjang kualitas hasil kerjanya. Faktor yang mempengaruhi kualitas auditor adalah pengalaman kerja, dimana dalam Rosalinda (2019), pengalaman auditor merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku auditor selama berinteraksi dengan tugas yang dilakukan selama rentan waktu tertentu. Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, auditor akan semakin mudah untuk menemukan kesalahan dan mengetahui penyebab kesalahan tersebut. Semua pengalaman yang diperoleh akan digunakan dengan baik oleh auditor dalam melakukan pekerjaan yang selanjutnya, sehingga hasil auditnya akan lebih berkualitas dari pada sebelumnya.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mereka mendapatkan hasil dari pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Risandy, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa tidak terbukti terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Dilihat dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa pengalaman kerja memiliki hubungan yang berbeda terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Independensi merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam pemeriksaan akuntansi. Auditor merupakan pihak independen yang terlepas dari kepentingan klien maupun pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan supaya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak siapapun. Jika seorang bersikap independen, maka ia akan memberi penilaian yang senyatanya terhadap laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah hasil laporan yang diperiksa (Singgih, 2010).

Auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Tidak mudah menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Kerjasama dengan klien yang terlalu lama bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Bagi auditor di lingkungan pemerintah (sektor publik), ada dua tanggung jawab utama dalam melaksanakan tanggung jawab profesionlnya yaitu, tingkat integritas, obyektivitas dan independensi setinggi mungkin.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mereka mendapatkan hasil mengenai pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Risandy, dkk. (2019) mendapatkan hasil yaitu independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prihartini, dkk. (2015) yang menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dilihat dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa independensi memiliki hubungan dengan kualitas audit.

Pengalaman Kerja dan Independensi yang dimiliki auditor sangat berkaitan dengan etika. Auditor mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi standar perilaku etis mereka terhadap organisasi di mana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri. Menurut Sukriah, dkk. (2009) menyatakan bahwa masalah sulit yang dihadapi oleh seorang auditor untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan dengan wajar, efektif, dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika juga memberikan pengaruh yang besar juga terhadap peningkatan Kualitas Audit.

Kharismatuti (2012), menyatakan bahwa auditor merupakan sikap atau nilai-nilai yang mencerminkan salah atau benar dari perilaku seorang auditor sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dalam rangka menjaga kualitas audit, setiap auditor internal pemerintah mempunyai prinsip etika kode etik yang dijadikan pedoman bagi aparatur auditor APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sehingga dapat memberikan citra yang baik terutama dalam bersikap

dan berperilaku. Prinsip-prinsip etika antara lain yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional (<http://berkas.dpr.go.id>).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa mengenai etika yang digunakan sebagai variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) terdapat pengaruh pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Risandy, dkk. (2019) yang mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara pengalaman kerja dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

Pada organisasi sektor publik yang bertindak sebagai auditor internal yaitu terdiri dari Inspektorat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Seperti yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 mengenai peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintah. Inspektorat Povinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi seperti pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawawasan. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, melaksanakan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan, dan aset serta bidang kasus;

kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Inspektorat sebagai internal audit pemerintahan dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung dengan adanya audit yang berkualitas, jika kualitas auditnya rendah kemungkinan akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga tujuan hukum (legitimasi) terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya (Susilawati, 2014).

Berdasarkan observasi yang saya lakukan terdapat fenomena ditemukan yaitu pengalaman kerja auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kurang optimal hal ini dikarenakan terjadi pengunduran diri auditor yang sudah berpengalaman dengan berbagai alasan salah satunya yaitu adanya intimidasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Selain itu adanya mutasi antar satuan kerja yang menyebabkan aparat yang berpengalaman di bidang auditor tergantikan oleh yang tak berpengalaman. Pengunduran diri dan mutasi auditor ini menyebabkan tergantinya auditor yang berpengalaman dengan

auditor yang belum berpengalaman, dan hal ini diduga akan menjadikan turunnya kualitas audit.

Fenomena lain yang saya temukan yaitu mengenai independensi, dimana independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu masih diragukan hal ini dibuktikan dengan auditor yang sering menghadapi berbagai tekanan dari pejabat instansi pemerintah yang diaudit ataupun pihak-pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada kepala Inspektorat Daerah Kabupaten OKU, Bapak Ari Santoso yang menyatakan bahwa beliau dibenci dan dimusuhi oleh pejabat pemerintah yang diaudit dan bahkan sempat dikondisikan supaya keluar atau dimutasi pindah tugas dari Kabupaten OKU (<http://:suaraindonesia-news.com>).

Selain pengalaman kerja dan independensi saya juga menemukan fenomena mengenai etika auditor yang juga terjadi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu, seorang auditor melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang masih memiliki hubungan keluarga sehingga kualitas audit yang dimiliki oleh pemerintah masih diragukan. Hal ini betolak belakang dengan kode etik yang mana dijelaskan bahwa pada melakukan pemeriksaan audit internal pemerintah apabila didalam instansi pemerintah tersebut terdapat terdapat pegawai yang masih memiliki hubungan keluarga, maka seorang auditor tersebut tidak boleh ikut serta dalam pemeriksaan hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten OKU tahun 2020 ditemukan beberapa temuan. BPK juga

menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan harus di perbaiki oleh Pemkab OKU, hasil temuan yang didapatkan yaitu, (1) Penatausahaan Persediaan pada tiga OPD, dan pengelolaan Aset Tetap belum memadai; (2) Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekertarat daerah kurang memadai; (3) Klasifikasi penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang tidak tepat; (4) Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan, kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Sekertariat DPRD, dan kelebihan pembayaran 45 Paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjan Umum dan Penata Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan (5) Sebanyak 373 penerima Bantuan sosial dalam bentuk uang dengan NIK ganda (<https://sumsel.bpk.go.id//p=30327>).

Berdasarkan latar belakang masalah yang tekah diuraikan di atas dan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, maka hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengambil judul **“Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas dan beberapa permasalahan yang terjadi pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu maka umusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu?

2. Apakah terdapat pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu?
3. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Kerja dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu?
4. Apakah Etika Auditor dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu?
5. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Kerja dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu?
6. Apakah Etika Auditor dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Pengalaman Kerja dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Untuk mengetahui variabel Etika Auditor dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Untuk mengetahui variabel Etika Auditor dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Independensi terhadap Kualitas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Untuk mengetahui variabel Etika Auditor dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Pengalaman Kerja dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan sumbangan dan memberikan wawasan di bidang akuntansi mengenai Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderating Studi Kasus Pada Inpektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang akuntansi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemegang Kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan

daerah sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas auditor Inspektorat.

- b. Bagi Akademis, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengaruh manajemen di sektor publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan juga akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Peneliti, sebagai sarana menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai permasalahan di sekitar melalui penelitian ilmiah.